



## Anggaran Infrastruktur Rp800 Miliar

**PONTIANAK** - Batas akhir ketuk palu rancangan perda APBD Kalbar tahun 2023 pada 30 November 2022. Sebelumnya DPRD Kalbar menargetkan bisa disetujui pada 25 November 2022. Rencananya pada Senin (28/11), paripurna ketuk palu APBD 2023 akan dilaksanakan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalbar, Fransiskus Ason sangat yakin ketuk palu rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD Kalbar tahun 2023 bisa dilakukan sebelum 30 November 2022.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

## Anggaran Infrastruktur Rp800 Miliar

Sambungan dari halaman 9

Sebab, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan pembahasan final dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Kami (DPRD) optimis Raperda APBD tahun anggaran 2023 bisa disahkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD sebelum 30 November," kata Ason, Kamis (24/11).

Menurutnya, sesuai jadwal yang disusun Banmus (Badan Musyawarah), ketuk palu APBD dijadwalkan pada 28 November 2022. Sementara batas akhir 30 November. Jika tidak dapat dipenuhi, maka kembali kepada aturan yakni pengesahan lewat Perkada (peraturan kepala daerah). "Kami rasa tidak ada masalah untuk pengesahan ini. Tinggal pembahasan finalisasinya saja," ucap dia.

"Anggaran Rp799 miliar ini terbagi di Bina Marga, Cipta Marga, dan Sumber Daya Air. Kalau tidak salah, untuk Bina Marga Rp495 miliar, Rp50 miliar lebih di Cipta Karya, dan SDA Rp100 miliar lebih," katanya.

Untuk porsi anggaran bidang pendidikan tetap mengikuti aturan yakni minimal 20 persen. Sektor kesehatan 10 persen lebih. "Bidang kesehatan kalau tidak salah total fokus anggarannya mencapai Rp600 miliar lebih. Dana tersebut termasuk rumah sakit. Artinya jumlahnya sudah melampaui dari aturan juga," katanya.

Ason memastikan bahwa tak ada persoalan yang akan membuat APBD tahun anggaran 2023 tidak diketuk palu. Namun, terkait pembahasan yang mendalam, Badan Anggaran masih fokus saling koordinasi. Fokusnya disesuaikan dengan target RPJMD Guber-

nur Kalbar.

"Untuk pembahasan ini agak mendalam karena kita bicara target RPJMD pak Gubernur. Untuk target RPJMD infrastruktur 80 persen jalan mantap. Sementara sekarang jalan mantap baru 72,18 persen," ucap dia.

Melihat prosi tambahan alokasi anggaran tahun 2023, sepertinya hanya mampu meningkatkan 4,47 persen saja. Jika ditambah 72,18 persen dengan tambahan 4,47 maka angka akhirnya diperkirakan sekitar 76,6 persen. Diprediksi tidak tercapai. Sebab 3 persen lebihnya masih terbatas soal anggaran.

Hanya saja, sambungnya, masih ada dana pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus (DAK) bisa meluncur dalam membantu membangun infrastruktur Kalbar. "Kami masih melobi pemerintah pusat supaya DAK segera meluncur," ujarnya. (den)

Ketua DPD Golkar Sanggau ini menambahkan, APBD tahun 2023, untuk belanja modal dianggarkan pemerintah sekitar Rp1 triliun lebih. Hanya fokus APBD masih pada seputar bidang dasar yakni infrastruktur.

Untuk infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan pemerintah sebesar Rp799 miliar. Anggaran ini terbagi pada beberapa bidang seperti Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air.